

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan pengaruh penerapan batas wilayah daratan berkaitan dengan penerapan hukum internasional yang menyangkut lintas batas bagi dua suku bangsa yang mempunyai kebudayaan dan latar belakang yang sama antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste adalah sebagai berikut:

##### **1. Terhadap Kedaulatan Kedua Negara di Perbatasan**

Penanganan batas wilayah daratan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste selama ini diwujudkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian bilateral dengan maksud agar memberikan kebebasan bagi dua negara dalam pelaksanaan kedaulatannya, oleh karena itu sangat di butuhkan peran aktif dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kecamatan dalam rangka tugas pembantuan, dalam konteks ini kecamatan merupakan institusi strategis yang mempunyai fungsi vital dalam menjaga dan mengelola perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste.

## 2. Terhadap Mobilitas Penduduk Perbatasan

Perjanjian bilateral yang dibuat antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara Timor Leste dalam melakukan kegiatan lintas batas, seperti memiliki surat izin masuk (*border crossing pass*) dari petugas pengawas perbatasan yang berwenang, kegiatan lintas batas juga harus melewati garis batas wilayah yang sudah ditetapkan, atau kegiatan lintas batas ini bertujuan untuk perdagangan, dan kegiatan-kegiatan tradisional lainnya seperti kunjungan keluarga, bercocok tanam, panen hasil kebun dan perkawinan oleh karena itu Untuk mengurangi lintas batas secara ilegal maka pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pembukaan pintu-pintu perbatasan yang sebelumnya berwujud jalan-jalan tikus menjadi pintu-pintu perbatasan yang resmi hal ini dimaksudkan agar memberikan kemudahan lalu lintas orang dan barang dan memudahkan pengawasan dan pengendalian keamanan di daerah perbatasan antara dua negara.

### **B. SARAN:**

1. Perlu keterlibatan Pemda dan masyarakat perbatasan agar lebih diintensifkan dalam memelihara dan mengawasi pilar (tugu) batas negara dan penambahan pilar-pilar baru yang selama ini hanya dilaksanakan pemerintah pusat.
2. Perlu ada prioritas pembangunan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap penduduk pulau-pulau di wilayah perbatasan yang lebih dekat dengan pusat

pemerintahan dan permukiman negara tetangga karena mereka menggunakan uang asing dan bahasa Negara tetangga dalam transaksi ekonomi. Mereka lebih banyak mendengarkan/ menonton siaran radio/TV asing. Penduduk pulau-pulau terpencil itu perlu mendapat bantuan (tunjangan/subsidi), kemahalan harga kebutuhan pokok yang sulit diperoleh dan sangat mahal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi Sumardiman., 1992, Seri Hukum Internasional, Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya-Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, Prad Paramita, Jakarta.
- Cf. James Crawford., 1979, The Creation of States in International Law, Clarendon Press, Oxford.
- D.J. Harris., 1979, Cases And Materials On International Law, Sweet and Maxwell, London.
- F. Sugeng Istanto., 1998, Hukum Internasional, cetakan kedua, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Greig D.W., 1976, International Law, 2<sup>nd</sup>.ed, Butterwoths, London.
- Hans Kelsen., 1956, Principles of International Law, Rinehart&Co, New York.
- Huala Adolf., 2002, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J.L. Bierly., 1954, The Law of Nations, 5<sup>th</sup>.ed, Clarendon Press, Oxford.
- Jhon O'Brien., 2001, International Law, Cavendish, London.
- J. G. Starke., 2007, Pengantar Hukum Internasional, Penerjemah Bambang Irina Djajaamadja, Buku I, Edisi kesepuluh, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Jawahir Thontowi, J. Sembiring dan Saru Arifin, Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Sajingan Besar dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Pusat Pembangunan Perbatasan.
- Malcolm N. Shaw., 2006, dalam Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung.
- Mirza Satria Buana., 2007, Hukum Internasional: Teori dan Praktek, FH Unlam, Banjarmasin.
- Mohammed Bedjaoui, International Law: Achievements and Prospects .
- Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur., Monografi Daerah Timor Portugis, Pemda Tingkat I NTT, Kupang

S. Tasrif., 1987, Hukum Internasional Tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek, cetakan kedua, Abardin, Bandung.

Sumaryo Suryokusumo., Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Edisi ke-2, Penerbit Alumni, Bandung.

Soekanto., 1976, Integrasi Kemerdekaan Timor Timur.

Todaro, M.P., 1998, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi keenam, Erlangga, Jakarta

### **Jurnal dan Surat Kabar**

Aswatini Raharto, 1998, Mobilitas Penduduk Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur Dalam Laporan Penelitian Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 1998.

Bappenas, 2006, Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Perencanaan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan (Direktorat Kewilayahan II Badan Perencanaan Dan Pembangunan Nasional) Jakarta, 2006.

Dirjen Imigrasi, 2007 Keimigrasian di Wilayah Perbatasan (Direktorat Jenderal Imigrasi: Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri) Jakarta, 2007.

D.Sidik Suraputra, 2006, Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya: Suatu Kumpulan Karangan, Diadit Media, Jakarta, 2006.

Government of the Peoples's Republic of Bangladesh, 1977, Position Paper on Delimitation of Baseline, 1977.

I Ketut Ardhana, 2006, Masalah Perbatasan di Asia Tenggara Dalam Perspektif Sejarah: Pengalaman Indonesia di Kalimantan Timur, Makalah dipresentasikan pada Konfrensi Nasional Sejarah VIII, Perbatasan dalam Pemikiran/Sikap Kultural, Keputusan Politik dan Letupan Peristiwa, di Jakarta pada tanggal 13-17 November 2006.

Irwan Lahnisafitra, Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Klimantan Barat-Serawak, Thesis Master S2 Pada Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung.

Jawahir Thontowi, J. Sembiring dan Saru Arifin, 2008, Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Sajingan Besar dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk

- Pusat Pembangunan Perbatasan (BDC), Laporan penelitian Kerjasama Antara CLDS FH UII dengan Pemkab Sambas, Kalimantan Barat, 2008.
- Pius Abdillah, Danu Prasetyo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penerbit Arkola, Surabaya.
- Priyatna Abdurrajjid, 1989, Kedaulatan Negara di Ruang Angkasa (Pusat Penelitian Hukum Angkasa) Jakarta, 1989.
- Sudjatmiko dan Rusdi Ridwan, 2004, Batas-Batas Maritim Antara Republik Indonesia Dengan Negara Tetangga, Jurnal Hukum Internasional Lembaga pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edisi Khusus Desember 2004.
- Jordao Da Silva, 2000, UNTAET-Indonesia menandatangani Persetujuan mengenai Masalah Perbatasan, Majalah Tais Timor 1-14 Mei 2000.

#### Website

- [www.nttonlinenews.com](http://www.nttonlinenews.com), Beberapa Aspek Hukum Internasional integrasi Timor- Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggal 5 November 2008
- [www.dephan.com](http://www.dephan.com), Laporan Akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor-timur 2008, tanggal 5 November 2008
- [www.resources.unpad.ac.id](http://www.resources.unpad.ac.id), Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 29 Oktober 2008, Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan, tanggal 5 November 2008
- [www.kompetitif.lipi.go.id](http://www.kompetitif.lipi.go.id), Pengaruh Batas Wilayah terhadap Dua Negara antara Indonesia dengan Timor Timor, tanggal 5 November 2008
- [www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com), Kasus Penembakan Perbatasan Timor Leste-RI Tegang, tanggal 5 November 2008
- [www.damandiri.or.id](http://www.damandiri.or.id), Eddy MT Sianturi dan Pengertian dan Definisi Wilayah Pesisir, tanggal 5 November 2008
- [www.dephan.com](http://www.dephan.com) Afsiah SP, 26 Maret 2008, Strategi Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI, tanggal 5 November 2008
- [www.suarakarya-online.com](http://www.suarakarya-online.com), F.H. Fobiah, 9 Agustus 2006, Pemberdayaan Masyarakat Adat, Penguatan Demokrasi Komunitas Masyarakat Adat, tanggal 5 November 2008

[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id), Pengertian Pelintas Batas, tanggal 7 November 2008

[www.damandiri.or.id](http://www.damandiri.or.id), Pengertian dan Definisi Wilayah Pesisir, tanggal 5 November 2008

[www.sinarharapan.co.id/berita/0609/19sh04.html](http://www.sinarharapan.co.id/berita/0609/19sh04.html), Dalam konteks ini, Indonesia kerap bersitegang dengan Malaysia dalam penentuan batas wilayah darat secara alami, seperti yang terjadi di sejumlah titik di Tanjung Datu yang telah dilakukan dua kali penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Republik Indonesia-Federasi Malaysia, masing-masing di kota Kinibalu, Sabah, pada tanggal 23 Agustus 1976 dan di Semarang, pada tanggal 18 November 1978. penolakan dilakukan oleh Indonesia karena telah ditemukan bukti baru berdasarkan literatur yang ada. Oleh sebab itu, Indonesia dengan tegas mnedesak dilakukan pengukuran ulang sejumlah titik di Tanjung Datu. Lihat Aju, 2006, Perbatasan Indonesia-Malaysia bak Api dalam Sekam, pada tanggal 11 November 2008

[www.bennysetianto.blogspot.com](http://www.bennysetianto.blogspot.com), Templeman L, Public International Law (London: Old Bailey Press, 1997) dalam Benny Setianto, 2006, Prinsip-Prinsip Modern Tentang Kedaulatan Wilayah, tanggal 11 Oktober 2008

[www.telagahati.wordpress.com/2007/11/16perjanjian-negara-baru-dalam-hi/](http://www.telagahati.wordpress.com/2007/11/16perjanjian-negara-baru-dalam-hi/) Yordan Gunawan 2007, Perjanjian Negara Baru dalam HI, tanggal 11 Oktober 2008

[www.watchindonesiatimor.org](http://www.watchindonesiatimor.org), Indonesia inginkan Pengaturan Perbatasan Tradisional Dengan TimorLeste, tanggal 7 November 2008

[www.bakosurtanal.go.id](http://www.bakosurtanal.go.id), Sobar Sutina, Tri Patmasari dan Sora Lokita, 2006, Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggal 8 November 2008